



Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Afrika: Tantangan dan Peluang

Oleh

Lusia Novita Sari

Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah, Asisten Deputi untuk Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
lusianovitasari@gmail.com

Salah satu pilar kebijakan luar negeri Indonesia adalah memperkuat diplomasi ekonomi, yang salah satunya akan dilakukan melalui upaya untuk menembus pasar-pasar non-tradisional.¹ Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Perdagangan untuk memperluas ekspor ke pasar non-tradisional dan tidak terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja.²

Kawasan Afrika menjadi salah satu tujuan pasar non-tradisional yang menjanjikan. Selain memiliki sumber daya alam yang kaya, kawasan ini juga memiliki populasi termuda dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan jumlah populasi yang diprediksi akan meningkat menjadi 2,5 miliar orang pada tahun 2050.³ Berdasarkan Laporan Dwi Tahunan African Development Bank, meski terjadi perlambatan ekonomi kawasan akibat pandemi COVID-19, perekonomian di 53 dari 54 negara di Afrika tetap menunjukkan pertumbuhan positif, dan diprediksi rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) riil rata-rata kawasan Afrika dapat tumbuh menjadi 4% pada tahun 2023 dan 2024.⁴ Di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global yang menyebabkan disrupsi perdagangan dengan negara-negara maju dan kenaikan harga komoditas, misalnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok maupun invasi Rusia ke Ukraina, menysar pasar non-tradisional seperti negara-negara Afrika penting untuk menggenjot ekspor Indonesia.

Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 54 negara, yaitu dengan 46 negara di kawasan Afrika Sub-Sahara dan 8 negara yang masuk dalam kluster kawasan Timur Tengah-Afrika Utara/*Middle East and North Africa* (MENA). Modal politik diplomasi Indonesia ke negara-negara Afrika telah tertanam semenjak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan partisipasi aktif dalam Gerakan Non-Blok

(GNB). Akan tetapi, kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Afrika masih perlu diperdalam.

Hal ini dapat dilihat dari masih kecilnya nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara Afrika. Pada tahun 2022, akumulasi nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan 54 negara mitra di kawasan Afrika mencapai USD 17,4 miliar (ekspor senilai USD 7,2 miliar dan impor senilai USD 10,2 miliar).⁵ Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Singapura mencapai USD 33,8 miliar (ekspor senilai USD 14,4 miliar dan impor senilai USD 19,4 miliar).⁶

Tren fluktuatif perdagangan bilateral Indonesia dengan negara-negara Afrika disebabkan oleh kondisi perekonomian domestik, pandemi COVID-19, dan fluktuasi harga komoditas, yang menyebabkan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia. Impor Indonesia dari negara pasar utama Afrika, seperti Nigeria, Afrika Selatan, dan Angola, menyumbang nilai defisit neraca perdagangan yang cukup besar: defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Nigeria sebesar USD 3,8 miliar, dengan Afrika Selatan sebesar USD 1 miliar, dan dengan Angola sebesar USD 553 juta.⁷ Untuk di bidang investasi, total realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dari 30 negara Afrika pada tahun 2022 mencapai USD 359 juta (atau sekitar 0,78 persen dari total realisasi investasi PMA global ke Indonesia pada tahun 2022 yang mencapai USD 45 miliar).⁸

Tantangan dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Afrika

Belum optimalnya pemanfaatan potensi kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Afrika dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, dari sisi kebijakan, sebagaimana diakui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, tantangan utama dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi ke negara-negara pasar non-tradisional adalah belum terpadunya kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.⁹ Sampai saat ini, belum ada kebijakan nasional berupa rencana strategis atau peta jalan diplomasi ekonomi ke Afrika, yang akhirnya menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dan kebijakan antar kementerian/lembaga, kantor perwakilan RI, maupun dengan pemangku kepentingan non-pemerintah yang terlibat dalam upaya menembus pasar Afrika.

Kedua, dari sisi sumber daya, dari total 54 negara di kawasan Afrika, Kantor Perwakilan RI baru hadir di 16 negara, yaitu sepuluh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara-negara Afrika Sub-Sahara dan enam KBRI di negara-negara Afrika Utara, serta satu Konsulat Jenderal Republik Indonesia





(KJRI) di Cape Town, Afrika Selatan. Beberapa KBRI merangkap minimal dua negara; bahkan KBRI Abuja, Nigeria, merangkap 11 negara. Kementerian Perdagangan juga baru memiliki satu Atase Perdagangan yang ditempatkan di KBRI Kairo, Mesir, dan dua *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC), yaitu di Johannesburg, Afrika Selatan, dan Lagos, Nigeria. Belum ada *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) di kawasan Afrika. Keberadaan ITPC, IIPC, atau Atase Perdagangan berkaitan dengan kerangka kebijakan diplomasi ekonomi yang lebih luas. Intinya, Kementerian Luar Negeri harus menjalankan peran yang lebih optimal. Berkaca dari praktik negara besar, seperti AS, Tiongkok, India, atau negara-negara Eropa Barat, hubungan perdagangan dan ekonomi merupakan bagian penting dari desain kebijakan luar negeri karena pertimbangan faktor keamanan dan daya saing. Sebagai perbandingan, India memiliki 47¹⁰ dan Tiongkok memiliki 53¹¹ misi diplomatik di Afrika.

Ketiga, faktor lainnya yang tidak dapat dipungkiri adalah keengganan pelaku usaha nasional untuk melakukan ekspansi bisnis ke Afrika. Negara-negara maju dengan pasar yang *established* masih menjadi tujuan utama ekspor, mengingat kondisi politik dan regulasi yang lebih jelas dan transparan di negara-negara maju. Mencari mitra lokal, baik dalam hal produksi dan distribusi, juga lebih mudah untuk dilakukan di pasar yang sudah *established*. Asumsi negatif bahwa kawasan Afrika miskin, rawan kekeringan, tidak aman, rawan konflik domestik, dan rawan banyak wabah penyakit juga memengaruhi keengganan tersebut.

Keempat, terbatasnya pembiayaan ekspor, jaminan kredit dan investasi, serta skema pembiayaan untuk proyek-proyek di Afrika juga menjadi kendala teknis bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi ke Afrika. Mahalnya biaya ekspor ke Afrika juga dipengaruhi tingginya biaya transportasi ke Afrika. Untuk menekan biaya ekspor ke Afrika, diperlukan kerja sama penurunan tarif. Namun demikian, saat ini Indonesia baru memiliki satu kerangka perjanjian kerja sama perdagangan bilateral dengan negara Afrika, yaitu *Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement* (IM-PTA), yang telah berlaku efektif sejak tanggal 6 Juni 2022.¹²

Terakhir, secara politik, fakta bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Afrika baru dilaksanakan di penghujung masa jabatannya juga dipandang secara awam sebagai indikasi dari belum pentingnya Afrika dalam pilar diplomasi Indonesia. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan kepala pemerintahan merupakan bentuk kontak diplomatik tertinggi antara dua negara, sekaligus menandai komitmen kedua pemimpin negara untuk lebih lanjut mengembangkan hubungan bilateral. Ketika suatu pemimpin negara melakukan kunjungan kenegaraan, hal tersebut juga mengindikasikan pentingnya negara yang dituju dalam kebijakan luar negeri pemerintahannya.¹³ Sebelum tahun 2023,



tercatat kunjungan terakhir Presiden Indonesia ke Afrika adalah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Liberia dan Nigeria pada tahun 2013.

Peluang bagi Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Afrika Mendatang

Untuk mengoptimalkan diplomasi ekonomi ke Afrika perlu disusun suatu peta jalan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia ke depan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya dan program yang dilakukan dapat direalisasikan dengan terpadu dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang ada.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang potensial namun belum tersentuh yang ada di Afrika. Misalnya, kerja sama di bidang industri farmasi dalam pengembangan vaksin pasca ditetapkannya Indonesia dan lima negara di Afrika sebagai *transfer hub* World Health Organization (WHO) untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA untuk penanganan COVID-19 dan penyakit lainnya.¹⁴ Negara-negara di Afrika juga dapat menjadi mitra yang potensial dalam pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle/Battery EV*), baik itu sebagai negara sumber bahan baku maupun tujuan ekspor produk. Misalnya, Zimbabwe merupakan salah satu negara dengan cadangan produksi litium terbesar di dunia.¹⁵ Sementara itu, Republik Demokratik Kongo merupakan produsen kobalt terbesar di dunia.¹⁶ Kedua mineral ini merupakan bahan baku penting dalam industri EV.

Peninggalan hubungan bersejarah pasca KAA dan GNB akan menjadi peluang bagi Indonesia dalam membangun kerja sama ekonomi di sektor industri ekstraktif dengan negara-negara Afrika, dibanding dengan negara-negara maju yang lekat dengan citra kolonial dan eksploitatif. Indonesia perlu menggunakan pendekatan yang berbeda, salah satunya dengan imbal balik menawarkan kerja sama teknis dalam pengembangan kapasitas untuk pengolahan bahan tambang. Selama ini, Indonesia telah menyalurkan bantuan pembangunan internasional maupun kerja sama teknis ke negara-negara Afrika, salah satunya kerja sama teknis dengan Tanzania terkait penyamakan kulit pada bulan Februari 2023.¹⁷ Ke depannya, diperlukan evaluasi terhadap dana pembangunan internasional dan kerja sama teknik yang telah diberikan, khususnya terhadap bagaimana implikasi bantuan yang disalurkan terhadap kepentingan Indonesia dan sejauh mana bantuan yang disalurkan Indonesia dapat membantu peningkatan taraf hidup masyarakat di negara-negara Afrika.





Dari sisi kerja sama perdagangan bilateral, IM-PTA merupakan modal awal yang baik dalam mendorong pembentukan kerangka kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara Afrika. Hal ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong ekspor Indonesia ke Mozambik, namun juga ke negara Afrika lainnya, mengingat Mozambik dapat menjadi hub bagi Indonesia ke Malawi, Kerajaan Eswatini, dan Zimbabwe. Hal yang terpenting adalah implementasi dan pemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan. Penjajakan pembentukan kerangka kerja sama perdagangan bilateral baru dengan negara-negara Afrika lainnya juga diperlukan. Selain itu, diperlukan juga mekanisme pembiayaan alternatif kerja sama ekonomi dengan negara-negara Afrika guna menekan biaya dan kerugian, seperti yang diimplementasikan dalam kerja sama dengan Sudan Selatan, yaitu imbal dagang pembiayaan proyek infrastruktur dengan minyak mentah.¹⁸

Hasil tur kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke negara-negara Afrika yang baru terlaksana membuktikan komitmen Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa Afrika penting bagi Indonesia. Hasil kunjungan kenegaraan tersebut tentunya perlu disambut dengan baik, khususnya rencana penyusunan desain besar pembangunan lima tahun ke depan untuk kerja sama Indonesia dan Afrika di sektor kesehatan, pangan, dan energi, dan sektor lainnya.¹⁹ Yang terpenting adalah merealisasikan berbagai rencana kerja sama yang telah disepakati. Kementerian terkait harus melakukan asesmen dan evaluasi pasca kunjungan kenegaraan Presiden ke Afrika.

Selain itu, mengingat saat ini jumlah Perwakilan RI di kawasan Afrika belum merepresentasikan besarnya kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut, perlu mempertimbangkan perluasan perwakilan RI di kawasan Afrika. Terakhir, upaya dalam membangun kepercayaan dengan negara-negara Afrika perlu menjadi prioritas. Kegiatan yang dapat mendorong kemitraan publik-swasta dan meningkatkan *people-to-people contacts* antara warga negara Indonesia dengan warga negara di kawasan Afrika juga dapat menjadi peluang untuk membangun kepercayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia.



Endnotes

- 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024*, (Oktober 2020), hlm. 89-90, <https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/619/Renstra-Kemlu-2020-2024.pdf>
- 2 "Sejumlah Arahkan Presiden dalam Rakernas Kementerian Perdagangan," *Presiden RI*, 4 Maret 2021, <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/sejumlah-arahan-presiden-dalam-rakernas-kementerian-perdagangan/>
- 3 Mayowa Kuyoro, Acha Leke, Olivia White, Jonathan Woetzel, Kartik Jayaram, & Kendyll Hicks, "Reimagining Economic Growth in Africa: Turning Diversity into Opportunity," *McKinsey Global Institute Special Report*, (5 Juni 2023), <https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/reimagining-economic-growth-in-africa-turning-diversity-into-opportunity#/>
- 4 "Africa's Economic Growth to Outpace Global Forecast in 2023-2024 – African Development Bank Biannual Report," *African Development Bank Group*, 19 Januari 2023, <https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/africas-economic-growth-outpace-global-forecast-2023-2024-african-development-bank-biannual-report-58293>
- 5 "Neraca Perdagangan Indonesia dengan Mitra Dagang," *Satu Data Perdagangan*, n.d., <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-dengan-mitra-dagang>
- 6 *Ibid.*
- 7 *Ibid.*
- 8 "Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 2018 s/d 2023," *National Single Window for Investment*, n.d., https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
- 9 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik Indonesia, "Bab 2: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan," dalam *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, hal. II.13, https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Dokumen%20RPJMN%202020-2024/Lampiran%201.%20Narasi%20RPJMN%202020-2024.pdf
- 10 "India Approves 18 African Missions," *Economic Diplomacy Division, Ministry of External Affairs of India*, 21 Maret 2018, <https://indbiz.gov.in/cabinet-approves-18-new-missions-in-africa/>
- 11 "Africa - Chinese Embassies," *The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*, n.d., https://www.fm-prc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/2490_665344/2493_665350/
- 12 "IM-PTA," *FTA Center*, 6 Juni 2022, <https://ftacenter.kemendag.go.id/indonesia-mozambique-preferential-trade-agreement>
- 13 Volker Nitsch, "State Visits and International Trade," *CESIFO Working Paper No. 1582 Category 7: Trade Policy* (November 2005), https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp1582.pdf
- 14 "Recipients of mRNA Technology from the WHO mRNA Technology Transfer Hub," *World Health Organization*, n.d., <https://www.who.int/initiatives/the-mrna-vaccine-technology-transfer-hub/recipients-of-mrna-technology-from-the-who-mrna-technology-transfer-hub>
- 15 Govind Bhutada, "This Chart Shows Which Countries Produce The Most Lithium," *World Economic Forum*, 5 Januari 2023, <https://www.weforum.org/agenda/2023/01/chart-countries-produce-lithium-world/>
- 16 World Economic Forum, "Making Mining Safe and Fair: Artisanal Cobalt Extraction in the Democratic Republic of the Congo," *White Paper*, (September 2020), https://www3.weforum.org/docs/WEF_Making_Mining_Safe_2020.pdf
- 17 "Indonesia-Tanzania Saling Tukar Pengetahuan Penyamakan Kulit," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 20 Februari 2023, https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_tanzania_saling_tukar_pengetahuan_penyamakan_kulit
- 18 Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Waskita Karya Bakal Bangun Jalan di Sudan Selatan Senilai Rp 25 Triliun," *Tempo*, 26 Mei 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1595224/waskita-karya-bakal-bangun-jalan-di-sudan-selatan-senilai-rp-25-triliun>
- 19 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia Perkuat Kemitraan dengan Mozambik", 23 Agustus 2023, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-sampaikan-komitmen-indonesia-perkuat-kemitraan-dengan-mozambik/>



THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by contributors at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The **Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: thc@habibiecenter.or.id

Website: www.habibiecenter.or.id